

Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia



**Muhammad Ridho
Iswardhana**



1. Orde Lama

Era Soekarno



PLN RI Orde Lama

PRINSIP PLN RI

- Memperjuangkan Pengakuan Kemerdekaan RI
- Keras dan Tegak dalam Perjuangan Politik LN
- **Menganut Anti Imprealisme dan Neokolonialisme**
- Diwarnai oleh Berbagai Konflik dan Konfrontasi
- Condong pada Blok Barat

PIDATO BUNG HATTA 1948

- Berjudul Mendayung di Dua Karang
- Penentuan Politik Luar Negeri Indonesia yang **Bebas Aktif**
- Bebas dalam Kepentingan Blok Barat maupun Blok Timur
- Aktif menjaga Perdamaian Dunia

Praktek Politik LN Soekarno

- 1. *Pembentukan*
Gerakan Non Blok
- 2. *Mendorong*
penggunaan
Diplomasi Melalui
Perundingan
- 3. *Menolak*
Invasi Vietnam
oleh Amerika
Serikat

- 4. Melakukan
Ganyang
Malaysia
- 5. Pembangunan
Proyek Mercuar
oleh Soviet
- 6. Menetapkan
Poros Jakarta-
Beijing-Pyongyang

- 7. **Melaksanak**
an Konferensi
Asia Afrika

2. Orde Baru

Era Soeharto



PLN RI Era Soeharto

- Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Malaysia.
- Prakarsa Pendirian ASEAN
- Menjadi Tuan Rumah KTT GNB dan Pertemuan Puncak APEC
- Mementingkan Kerjasama dan Ekonomi
- Cenderung Condong ke Negara-Negara Barat

Normalisasi Hubungan dan Pendirian ASEAN

- Indonesia Kembali Menjadi **Anggota PBB** pada **28 September 1966**
- Melakukan Normalisasi Hubungan Luar Negeri dengan **Malaysia, Singapura**
- **Pendirian ASEAN** pada 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok diwakili oleh Menlu Adam Malik
- Awalnya Malaysia dan Filipina Ragu dalam usul Indonesia, namun pada Akhirnya mereka setuju dan terbentuklah ASEAN

Deklarasi Juanda

DEKLARASI JUANDA

- Dicetuskan pada **13 Desember 1967**
- Menyatakan kepada Dunia bahwa laut di disekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah **Laut Indonesia dan Wilayah NKRI**
- Tahun 1999 diperingati sebagai **Hari Nusantara**

ISI DEKLARASI JUANDA

- Indonesia Menyatakan sebagai **Negara Kepulauan yang memiliki Corak tersendiri**
- Sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara merupakan **Satu Kesatuan**
- Memiliki Tujuan NKRI yang utuh dan bulat, Penentuan Batas-Batas NKRI berdasarkan Kepulauan, dan demi mengatur lalu-lintas pelayaran yang damai demi Keamanan dan Keselamatan NKRI

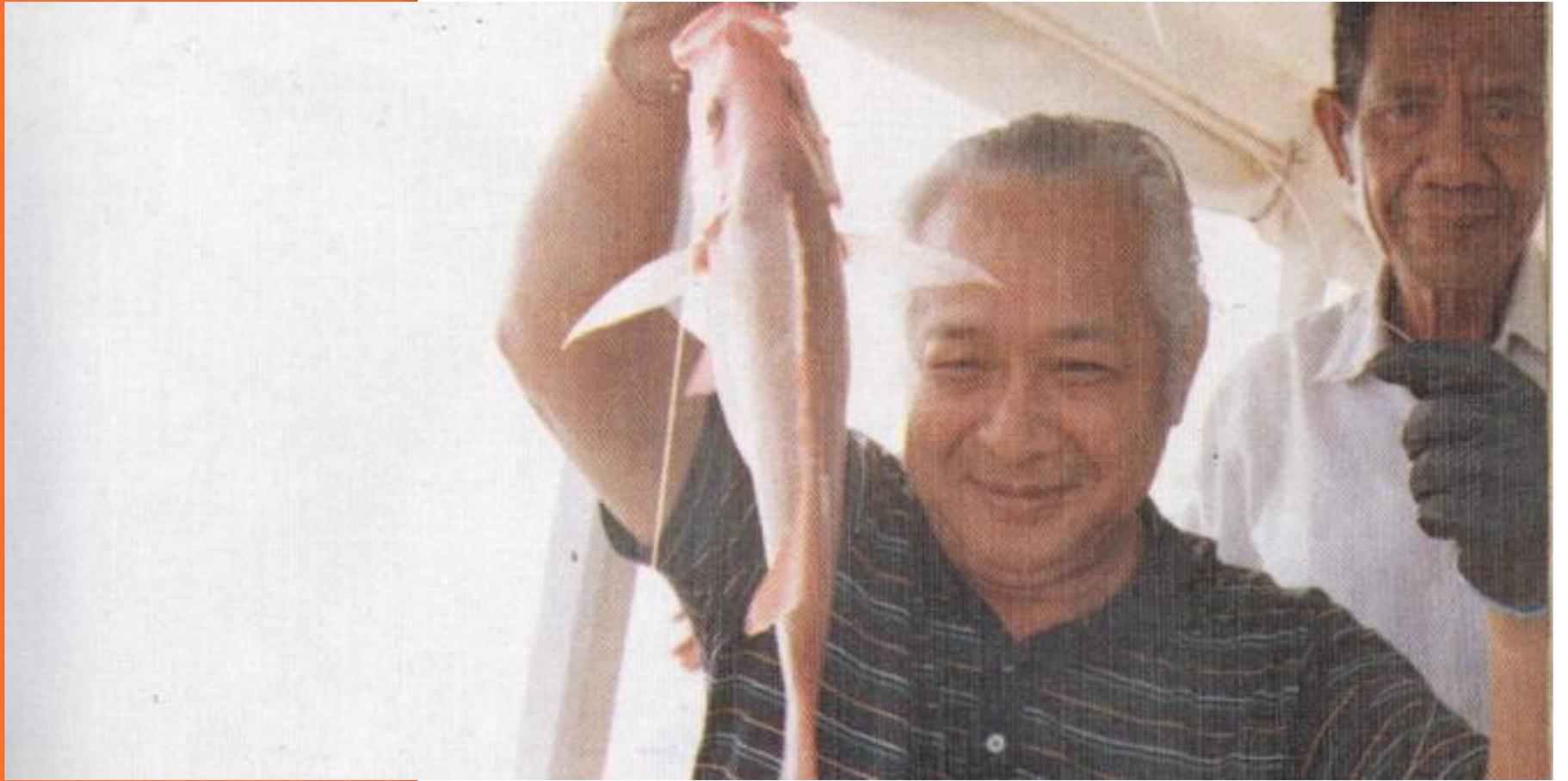
Ekonomi dan Investasi

1. Masa Orde Lama Indonesia tersita dalam Ambisi Politik Soekarno
2. Orde Baru Berusaha Memperbaiki Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
3. Dibuka penerimaan investasi oleh Perusahaan-Perusahaan asal Barat di Indonesia (Freeport)
4. Indonesia menjadi Anggota APEC, IGGI, WTO, IMF, dan Bank Dunia
5. Perekonomian Indonesia menjadi cenderung Liberal dan Kapitalis

Mengunjungi Wilayah Konflik Bosnia



1. **Maret 1955 Presiden Soeharto berkunjung ke Eropa lalu ke Bosnia**
2. Kunjungan didampingi Menlu Ali Alatas
3. Presiden Soeharto Mengenakan Jas & Kopiah tanpa Rompi anti Peluru
4. **Sebagai bentuk Solidaritas Negara-Negara Non Blok**
5. **Dianggap sebagai Perjalanan Bersejarah Presiden Soeharto**



3. Reformasi

Era Kontemporer



Abdurrahman Wahid
(Okt. 1999 – Jul. 2001)



Megawati Soekarnoputri
(Jul. 2001 – Okt. 2004)



Susilo Bambang Yudhoyono
(Okt. 2004 – Okt. 2014)



Joko Widodo
(Okt. 2014–sekarang)

Implementasi Masa Reformasi

- Melakukan Diplomasi berdasarkan Asas Demokrasi
- Melakukan Hubungan Diplomatik lebih dekat selain dengan Barat (Kerjasama Pertahanan Rusia, Kerjasama Ekonomi RRT, dan Merangkul Negara Pasifik)
- Menjadi Kekuatan Ekonomi Dunia G-20
- Menjadi Anggota OKI
- Memiliki Prinsip *1000 Friends and Zero Enemy*
- Menerapkan Poros Maritim

Politik LN Presiden Jokowi

Berdasarkan Visi Nawa Cita

1. Memberikan Penekanan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
2. Berfokus pada Pembangunan Infrastruktur Mengundang Investasi Asing
3. Melakukan Deklarasi Kerjasama Negara-Negara Maritim
4. Peningkatan Peran Indonesia dalam G-20
5. Penyelesaian Konflik Rohingnya melalui Peranan ASEAN dan Indonesia
6. Meningkatkan Kemitraan Ekonomi dengan Arab Saudi, Tiongkok, dan Rusia
7. Pembangunan Keuangan Inklusif digital
8. Konsisten Mendukung Kemerdekaan Palestina

Thank You !

Hope you understand about
Indonesian Foreign Policy

